

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Apeldoorn, Van, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Atmosudirdjo, Prajudi, 1983, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia. Indonesia, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2009, *Sejarah Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- John Gillisen dan Frits Gorle, 2011, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamidi, Jazim, 2011, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- \_\_\_\_\_ 2013, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- HS. H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kaho, Josep Riwu, 2013, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyono, 2008, *Manajemen Administrasi Manajemen administrasi & organisasi pendidikan*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media.
- Murhabbi, Suriansyah, 2006, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Nugraha , Safri dan Anna Erliyana, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Center for Law and Good Governance Studies (CLGS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Nurcholis, Anif, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- Rachman, Arifin Abdul, 2001, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*, CV. Haji Mas Agung. Jakarta.
- Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Di Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Syafrudin, Ateng, 2003, *Naskah Lepas Masalah-masalah Hukum Otonomi Daerah (Arti Pengawasan)*, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Sujanto, 2000, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Sejarah Hukum*, Alumni. Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada.
- Yuhoyono, Bambang, 2001, *Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

#### **MAKALAH/ KARYA TULIS ILMIAH/ JURNAL**

- Ahmad, Sutrisno, 2014, Kebijakan Politik Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi I, Volume 2, Tahun 2014
- Achmad, Fauzi, 2013, Peran Inspektorat Kabupaten/Kota Sebagai Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah Daerah Menuju Tata KePemerintahan Daerah Yang Baik, *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol.10 No.2 April 2013
- Ade Cahyat, 2004, Sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah daerah Kabupaten (Pembahasan Peraturan PerUndangan di Bidang Pengawasan), *Jurnal Center For International Forest Research*, Number 3, November 2004.
- Himpunan Hasil Kelitbangan Bpp Kemendagri Tahun Anggaran 2013 (Penelitian, Pengkajian, Penerapan dan Pengembangan Kebijakan/FGD).

- Juharni, 2016, Model Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Di Kabupaten Sinjai, *Jurnal Ad'ministrare*, Vol. 3 No. 1, 2016.
- Kelompok 6 , 2014, Penerapan Manajemen Pengawasan Administratif Dalam Pemerintahan, *makalah*.
- Muhtar, E. A., 2008, Pelayanan Publik di Indonesia dalam Perspektif Kultural, *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 1
- Novita T.Dethana, Minarni A. Dethan, tt, Pengaruh Kompetensi dan Independensi Pengawas Terhadap Kualitas Pengawasan Koperasi Serba Usaha di Kota Kupang, *Jurnal Universitas Nusa Cendana*, Kupang, Indonesia.
- Prabawati Wibawa, 2015, Hubungan Kerja Patron Klien Di Sentra Industri Pembuatan Genteng Winong (Studi Kasus Antara Majikan Dengan Buruh Sentra Industri Pembuatan Genteng Di Desa Gulun, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur), *Jurnal Sosiologi DILEMA*, Vol. 30, No. 1 Tahun 2015).
- Richo Andi Wibowo, et.al, 2018, Wacana Pemerintah Untuk Mereposisi Kelembagaan Inspektorat: Tindak Lanjut, Tanggapan, Serta Inisiasi Kedepan, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 No. 4 (2018)
- Riris Katharina, 2017, Memperkuat Peran Inspektorat Daerah Dalam Pemerantasan Korupsi, *Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, Vol. IX, No 18/II/Puslit/September/2017, Jakarta.
- Taufiq, Muh, Efendy, 2010, Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Gorontalo), *Tesis*, Program Studi Magister Sains Akuntansi, Semarang.

## INTERNET

- Aji, Galang Putro, 25 Januari 2017, KPK Ingin Inspektorat Pemda Independen, Tjahjo Kumolo: Saya Setuju, <https://news.detik.com/berita/d-3405482/kpk-ingin-Inspektorat-pemda-independen-tjahjo-kumolo-saya-setuju>.
- Ayu, Panca Rini, 03 Agustus 2017, Perlunya Penguatan Peran Inspektorat Agar Tidak Dibawah Sekertaris Daerah, <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/03/mendagri-kok-Inspektorat-ikut-terlibat-suap-apa-kerjanya>.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Hasil Rakornas, Tanpa Tanggal, <http://www.bpkp.go.id/konten/2338%20/rakorn>.
- Black's Law Dictionary* <https://thelawdictionary.org/search2/?cx=partner-pub-2225482417208543%3A5634069718&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8&q=tactic&x=0&y=0>.

- Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM, 2017, <http://politiklokal.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/pol.-sentralisasi-dekonsentrasi-dan-Vrij-Bestuur.pdf>,
- Dylan Aprialdo Rachman, 2018, Cegah Korupsi Kepala Daerah, KPK Dorong Pemerintah Perkuat APIP", <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/09/15585571/cegah-korupsi-kepala-daerah-kpk-dorong-Pemerintah-perkuat-apip>.
- Gabrilin, Abba, 26 Mei 2017, "KPK dan Mendagri Ingin Inspektorat Berani Laporkan Penyimpangan Kepala Daerah", <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/26/14394541/kpk.dan.mendagri.ingin-inspektorat.berani.laporkan.penyimpangan.kepala.daerah>,
- Hakim, Rahmat Nur, "Mendagri Bakal Perluas Kewenangan Inspektorat Daerah", <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/04/23004051/mendagri-bakal-perluas-kewenangan-Inspektorat-daerah>.
- Moh. Kadafi , 2018, Mendagri Sebut KPK Minta Kemendagri & Kemenpan RB Rumuskan APIP Dalam 1 Bulan, <https://www.merdeka.com/peristiwa/mendagri-sebut-kpk-minta-kemendagri-kemenpan-rb-rumuskan-apip-dalam-1-bulan.html>.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan BPKP, 2016, <http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2674/16.050-Faktor-Faktor-Penyebab-Kepala-Daerah-Korupsi>.
- Rahmawati, Wahyu, 04 Desember 2017, KPK minta Pemerintah perkuat pemeriksa internal. <http://nasional.kontan.co.id/news/kpk-minta-Pemerintah-perkuat-pemeriksa-internal>.
- Rifa'i, Bahtiar , "Kemendagri Ingin Inspektorat di Daerah Setara Sekda", <https://news.detik.com/berita/d-3788650/kemendagri-ingin-Inspektorat-di-daerah-setara-sekda>,
- Susanti, Reni, "Kasus Korupsi, Mantan Bupati Pamekasan Didakwa Pasal Berlapis", <https://regional.kompas.com/read/2017/10/20/22224081/kasus-korupsi-mantan-Bupati-pamekasan-didakwa-pasal-berlapis>.<https://regional.kompas.com/read/2017/10/20/22224081/kasus-korupsi-mantan-Bupati-pamekasan-didakwa-pasal-berlapis>,
- Sri Nawangsari, Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkuat Perekonomian Daerah, repository.upnyk.ac.id/3635/1/Prosiding\_02.pdf.

## **PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 2006 nomor 4654)

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 No. 10, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3373)

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127)

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 6041)

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan  
Jabatan Struktur.

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan  
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola  
Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1979 tentang Susunan  
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Daerah  
Kabupaten/Kotamadya

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan  
Represif Kebijakan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman  
Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman  
Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

## **WAWANCARA**

Mauritz P. M (Kepala Pusat Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Dalam Negeri) di Jakarta pada Senin/ 30 Agustus 2018 Gedung usat  
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.

Sugeng Hariyono (Inspektur II Itjen Kemendagri) Senin/30 Agustus 2018  
di Gedung Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.